BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan pemungutnya. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2011: 1).

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, misalnya menjalankan pembangunan nasional, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi stabilitas, dengan adanya pajak ini berarti pemerintah mempunyai dana dan menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, pembangunan yang dilakukan diberbagai bidang dan merata ini dapat

menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat (Ilyas dan Burton, 2007:10).

Mengingat banyaknya manfaat pajak, maka pajak sangatlah penting bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU KUP. Sarana untuk membayar pajak ialah Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, wajib pajak melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan di isi oleh wajib pajak dengan benar, jelas dan lengkap.

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia digunakan sistem *self assessment* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh pajib pajak. Sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Sistem *self assessment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assessment* ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya (Siregar, et al. 2012: 2)

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai fungsi sebagai identitas wajib pajak tersebut. Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan fungsi dari memiliki NPWP. wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

Setelah Wajib Pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, fungsi NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Sistem *self assessment* suatu cara wajib pajak dituntut dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam sistem *self assessment* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun tidak semua wajib pajak tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem *self assessment* yang menuntut keaktifan wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya, diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa adil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak.

Selain itu kepatuhan wajib pajak didukung dengan sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat diterapkan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini

pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu: Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu: sanksi bunga, sanksi kenaikan dan sanksi denda, sedangkan sanksi pidana dibagi atas denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara (Mardiasmo, 2011: 59). Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.

Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib Pajak terdaftar. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara masih rendah. Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara Kepulauan Riau untuk membayar dan melaporkan SPT masih rendah, dari 32.729 Wajib Pajak badan usaha wilayah kerjanya, hanya 21,2 persen yang melaporkan SPT. Kemudian dari 253.258 Wajib Pajak orang pribadi karyawan hanya 36,9 persen yang melaporkan SPT dan dari 159.729 Wajib Pajak OP pekerja bebas hanya 38,5 persen yang melaporkan SPT (www.pajak.co.id).

Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan jumlah total wajib pajak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai:

“PENGARUH SISTEM *SELF ASSESSMENT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama pemungutannya menggunakan sistem *self assessment*.
2. Menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak masih rendah.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yang digunakan yaitu sistem *self assessment*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian , perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015?
3. Bagaimana pengaruh sistem *self assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem *self assesment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama masalah sistem *self assessment* dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara.

1.6.2 Manfaat praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

b. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan dimasyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada KPP Pratama Batam Utara.